



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2024 dapat diselesaikan.


Penyusunan Laporan ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam mengelola perencanaan pembangunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan di Dinas Kesehatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 .

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tahun 2023 .

Sigli, 22 Januari 2024

**Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PIDIE**



dr.Dwi Wijaya
Nip. 19780218 200312 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan.....	12
C. Gambaran Pencapaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan Masyarakat.....	13
D. Kondisi Sosial	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Perencanaan.....	20
B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023.....	22
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	27
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2023.....	39
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Tabel I.1 Jumlah PNS Menurut Golongan.....	11
BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
Tabel II.1 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023.....	26
Tabel II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
Tabel III.1 Katagori Pencapaian Kinerja	31
Tabel III.2 Realisasi Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan/ Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.....	32
Tabel III.3 Realisasi Pelaksanaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustudan Prasarana lainnya.....	32
Tabel III.4 Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pendidikan dan pelatihan formal.....	33
Tabel III.5 Realisasi Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat/ Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya	34
Tabel III.6 Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak/ Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.....	35
Tabel III.7 Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak/ Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.....	36
Tabel III.8 Realisasi Pelaksanaan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan/ Evaluasi Dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	36
Tabel III.9 Realisasi Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Jasa peralatan dan perlengkapan, administrasi, perencanaan	37
Tabel III.10 Realisasi Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat/ Pemberian tambahan makan dan vitamin	37
Tabel III.11 Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023.....	40
Tabel III.12 Akuntabilitas Keuangan Capaian Kinerja Menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, pembangunan nasional dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta tanggap terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemberdayaan. Tahun 2023 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Periode 2023-2026 .

Pidie sebagai salah satu Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Aceh dengan Jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak 223.208 jiwa dan Perempuan sebanyak 224.877 jiwa serta Jumlah keseluruhan sebanyak 448.085 jiwa (estimasi BPS 2023) yang terletak pada posisi 04.30° - 04.60° Lintang Utara dan 95.75° - 96.20° Bujur Timur dengan Luas Wilayah secara keseluruhan mencapai 3.562,14 km² serta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie Jaya
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan, 94 Kemukiman, 730 Gampong.

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum
 2. Subbag Keuangan dan Pengelola Aset
 3. Subbag Program, Informasi dan Humas
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Kesehatan Tradisional



- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 - 1. Seksi Suerveillans dan Imunisasi
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Seksi Kefarmasian
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melakukan tugas umum Pemerintahan di bidang pengendalian masalah Kesehatan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jaminan dan Sarana Kesehatan sesuai dengan Perundang undangan. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan Lingkungan, pembinaan pelayanan Kesehatan, pengembangan sumber daya Kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu pelayanan dan peningkatan kualitas laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie mempunyai fungsi:

- 1. Merumuskan kebijakan umum di bidang Kesehatan
- 2. Menyusun rencana dan program kesehatan.
- 3. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan
- 4. Merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- 5. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang kesehatan.



6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dibidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan pemukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma.
7. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga sarana kesehatan.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan.
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan.
10. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten dibidang Kesehatan.
12. Pembinaan UPTD.
13. Pembinaan kelompok fungsional.

Pada tanggal 04 Desember 2023 Kepala Dinas Kesehatan Pidie meninggal dunia maka semua tugas dialihkan ke Sekretaris Dinas Kesehatan

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/ rekomendasi;



- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi hubungan masyarakat dan protokol.
- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari:

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelitian, pengkajian, pengembangan, analisis data dan penyusunan program, penyusunan rencana strategis serta rencana kerja tahunan.
2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, arsip, standarisasi serta hubungan dengan masyarakat dan protokoler, administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Pengelola Aset, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, rencana kebutuhan Dinas, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan aset daerah.



c. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas pokok bidang pelayanan kesehatan adalah menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan primer, program pelayanan kesehatan rujukan dan program pelayanan kesehatan tradisional;

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, bidang Pelayanan Kesehatan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan serta manajemen program Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan;
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- h. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran cangguh;
- i. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan; dan



- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program upaya pelayanan kesehatan primer
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan melakukan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional melakukan penyusunan perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

Tugas pokok bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;



- c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
- d. Penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1. Seksi Surveillans dan Imunisasi, yang menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang mempunyai tugas Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan



program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang mempunyai tugas Menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

Tugas pokok bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan adalah Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat program penyehatan lingkungan, makanan dan minuman, program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penjabaran kebijakan, pengembangan pedoman dan standar pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penggerakan program dan kegiatan serta peningkatan mutu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;



- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan dan perizinan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Penyelenggaraan surveilans (pengamatan) kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya kesehatan program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat, yang mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat.
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga.



f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas pokok bidang Sumber Daya Kesehatan adalah Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan operasional dan penetapan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Kefarmasian, makanan dan minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia kesehatan;
- c. Penyusunan perencanaan dan pengadaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- d. Pengkoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral pelaksanaan Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program bidang Sumber Daya Kesehatan;

Bidang bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan mutu obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, obat tradisional dan kosmetika, makanan dan minuman.
2. Seksi Alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan



operasional dalam hal perencanaan dan pengadaan, pendistribusian kebutuhan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada unit pelayanan kesehatan.

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan Penyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Komposisi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagian besar berpendidikan Sarjana. Potensi ini merupakan salah satu pendorong dan sumber motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dan produktif secara efektif dan efisien untuk melaksanakan semua tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan organisasi. Adapun komposisi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan rincian sebagai berikut :

NO	INSTANSI	Jumlah Pegawai Seluruhnya	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Orang	Ket
1	2	3	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan		Pembina Utama Muda	IV/c	8	
			Pembina Tk I.	IV/b	10	
			Pembina	IV/a	37	
			Penata Tk.I	III/d	507	
			Penata	III/c	303	
			Penata Muda Tk.I	III/b	282	
			Pembina	III/a	101	
			Pengatur Tk. I	II/d	295	
			Pengatur	II/c	107	
			Pengatur MudaTk. I	II/b	4	
			Pengatur Muda	II/a	7	
			Juru Tingkat I	I/d	3	
Jumlah					1.664	



Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil Per 31 Desember 2023 sebanyak 1.644 Orang dan didukung oleh Tenaga Kontrak 124 orang, Tenaga Nusantara Sehat 4 orang dan Tenaga Sukarela sebanyak 1945 orang yang tersebar di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie serta di 26 Unit Puskesmas, 71 Pustu, dan 112 Poskesdes.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

a. Tinjauan dari aspek administrasi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, mukim dan gampong; dan Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tinjauan dari aspek politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan indikasi bahwa keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Roda Pemerintah Daerah serta menjamin upaya pelaksanaan program kesehatan bagi masyarakat secara berjenjang.

2. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie mempunyai tugas Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kesakitan dan kematian.



3. Fungsi dan Kewenangan

a. Fungsi

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana sebuah organisasi harus dibawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antifatif, inofatif serta produktif. Fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan visi yang merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Kewenangan merupakan sesuatu tanggung jawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan diatas.

C. Gambaran Pencapaian Kinerja Sasaran Bidang Kesehatan

1. Strategi

Untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan daerah, perlu dibarengi dengan kebijakan dari SKPK yang jelas, rasional dan konfrehensif. Adapun yang menjadi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah;

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan
- b. Meningkatkan kinerja, mutu, akses, kelengkapan dan distribusi sarana kesehatan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.
- d. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
- e. Meningkatkan kerja sama lintas sector.

2. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahunan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.



Berdasarkan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka arah kebijakan program yang telah ditetapkan yaitu : **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie”** yang digambarkan menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), meningkatkan umur harapan hidup, menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan status gizi masyarakat serta mampu mempraktekkannya. Dari arah kebijakan umum tersebut di atas dikembangkan arah kebijakan khusus yang ingin dicapai seperti :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan komunitas
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan khusus
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi dan surveilans
- e. Meningkatnya kualitas lingkungan
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya Kesehatan dan teknologi
- g. Terwujudnya Kelurahan Siaga Aktif dan Utama

3. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan. Sasaran dari organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu anak.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan pada Masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular (PTM)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi.
5. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan.
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung Puskesmas, Puskesmas pembantu, Laboratorium, Rumah Dinas dokter dan Perawat, Kendaraan Pusling serta perlengkapan kantor.
7. Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, reagen laboratorium dan alat Kesehatan (ALKES)



8. Meningkatnya kualitas pelayanan sarana kesehatan dasar dan penunjang kesehatan.
9. Terpenuhiya SDM kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
10. Terpenuhiya sumber dana (anggaran) Kesehatan dari berbagai sumber untuk penyusunan program.
11. Meningkatnya PHBS pada Masyarakat.
12. Meningkatnya upaya Kesehatan berbasis Masyarakat.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar;
- b. Ikhtisar Eksekutif;
- c. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan, gambaran pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah dan kondisi sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- d. Bab II – Perencanaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang dokumen-dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahun 2023, Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang menjadi dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;
- e. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2023, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun Anggaran 2023;
- f. BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;
- g. Lampiran - Lampiran.



5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan dimaksudkan juga untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Strategis sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Periode 2023–2026 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana harapan kita semua. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2023 ini menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan capaian program Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 .

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Peratruran Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
11. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

D. Kondisi Sosial

1. Budaya Kerja Sehari – Hari

Situasi dan Kondisi pada Dinas Kesehatan sehari – hari berjalan normal sebagaimana kondisi di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang lain dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pidie, dimana semua Pegawai Negeri Sipil mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian



dan Kepala Subbidang serta semua Staf, bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada dan uraian tugas yang telah dibagikan kepada setiap pegawai, namun apabila atasan meminta untuk mengerjakan tugas tambahan atau di luar tupoksi akan tertangani dengan baik dan yang melakukan tersebut tidak hanya tertumpu pada satu orang pegawai saja akan tetapi sesuai dengan beban, jenis, resiko dan waktu pekerjaan tersebut cocok dilakukan.

Lain halnya kalau ada kegiatan atau pekerjaan yang membutuhkan banyak pekerja karena tidak mungkin dikerjakan sendiri seperti penyiapan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional, Pelatihan Keterampilan Bidan Dan Perawat, Bakti Sosial Bidang Kesehatan, Penyiapan Stand Pedir Raya Festival maka semua unsur yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ikut terlibat secara aktif.

2. Kedisiplinan

Kedisiplinan pegawai untuk mematuhi aturan jam masuk kerja berjalan dengan sangat baik dimana setiap hari Senin apel pagi untuk semua pegawai dan untuk hari lainnya masuk kantor tepat jam 08.00 s/d 16.45 untuk hari Senin s/d hari kamis dengan waktu istirahat pukul 12.30 s/d 13.30, sementara untuk hari jumat waktu istirahatnya lebih cepat dan hari sabtu tidak termasuk lagi sebagai hari kerja karena Kabupaten Pidie sudah menganut system kerja 5 (Lima hari), namun dihari sabtu atau hari libur lainnya bahkan di malam harinya, sebagian pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sering dimanfaatkan untuk melakukan penyelesaian beban pekerjaan ke depan atau yang belum sempurna atau belum selesai dikerjakan untuk mengejar ketertinggalan terutama oleh Staf yang menangani pekerjaan sebagai Bendahara, dan sering ditemani oleh Kepala Dinas atau Sekretaris serta para Kepala Bidang yang bersangkutan dengan jenis pekerjaan tersebut.

3. Hubungan Emosional dan Silaturahmi Antar Pegawai.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, para pegawai Dinas Kesehatan selalu berinteraksi dengan pegawai yang bertugas di level Puskesmas dan jaringannya, karena unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sampai ke level Poskesdes.



Masa kerja para pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie lebih banyak yang sudah memiliki masa kerja di atas 15 (Lima belas) tahun bahkan ada yang sudah mendekati 20 (Dua puluh) tahun atau lebih serta tidak berpindah – pindah kecuali hanya sebahagian kecil yang masih baru atau belum memiliki kerja yang begitu lama, sehingga sangat jelas terlihat hubungan atau suasana antar para pegawai yang begitu kental, dan semua itu merupakan sebagai modal dalam membangun komunikasi yang efektif untuk terjalannya kerjasama antar bidang maupun dengan atasan masing – masing serta memudahkan terbangunnya hubungan dengan stakeholders terkait diluar instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie.

Tidak jauh berbeda dengan hubungan emosional sehari – hari yang terlihat di kantor sebagaimana tergambar di atas bahwa, hubungan silaturahmi yang terjalin antar pegawai Dinas Kesehatan juga tidak jauh berbeda baik sesama para pegawai maupun antar anggota keluarga, hal tersebut dapat terlihat baik dengan adanya kegiatan Arisan antar pegawai maupun ketika salah satu pegawai atau anggota keluarganya mengalami musibah, baik musibah meninggal, musibah karena sakit, ketika ada pegawai yang melahirkan, pesta perkawinan dan kenduri Maulid dan lain sebagainya, dengan mengumpulkan dana sosial, Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan.

4. Kerja Sama dan Komunikasi

Sebuah organisasi yang modern dan membidangi pelayanan publik akan dituntut untuk selalu visioner, memiliki sifat terbuka, mampu bekerja sama, baik secara interen maupun eksteren, terarah dalam pelayanan, memiliki target kinerja yang jelas dan lain sebagainya, demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang membidangi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki tanggung – jawab yang besar menyangkut dengan pelayanan publik, sehingga sangat di harapkan mampu membangun kerja sama yang baik mulai dari Dinas Kesehatan sampai dengan level Puskesmas dan jaringannya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah menyusun dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 yang telah dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program serta Kegiatan pembangunan kesehatan yang telah direncanakan serta perkiraan jumlah anggaran per Program/Kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan mulai dari tahun 2019 s/d tahun 2024 .

Untuk menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan pembangunan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan, juga disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan memuat Program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran untuk setiap tahunnya.

1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana strategis memuat strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sekaligus merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan lima tahunan ke depan. Hal tersebut ditempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan kesehatan sebagaimana yang telah diembankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yaitu peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), meningkatkan umur harapan hidup, menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan status gizi masyarakat serta mampu mempraktekannya dan terwujudnya *Good Governance* (Pemerintahan yang baik).

Untuk pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan upaya-upaya yang terarah dan strategis mengingat cakupan permasalahan kesehatan yang masih banyak dalam masyarakat oleh karena itu,



diharapkan, dengan terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya di bidang kesehatan ini yang dapat dijadikan pedoman atau panduan dalam kerangka sebuah upaya koordinasi dan pemantapan arah kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Pidie dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan.

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang telah ditetapkan yaitu : **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie”** yang digambarkan menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), meningkatkan umur harapan hidup, menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan status gizi masyarakat serta mampu mempraktekkannya.

Dari tujuan umum tersebut di atas dikembangkan tujuan khusus yang ingin dicapai seperti :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan komunitas
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan khusus
- c) Meningkatnya kualitas pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi dan surveilans
- e) Meningkatnya kualitas lingkungan
- f) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya Kesehatan dan teknologi
- g) Terwujudnya Kelurahan Siaga Aktif dan Utama

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan. Sasaran dari organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:



- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu anak.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan pada Masyarakat.
- 3) Meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi.
- 5) Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan.
- 6) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung Puskesmas, Puskesmas pembantu, Laboratorium, Rumah Dinas Dokter dan Perawat, Kendaraan Pusling serta perlengkapan kantor.
- 7) Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, reagen laboratorium dan alat Kesehatan (ALKES)
- 8) Meningkatnya kualitas pelayanan sarana Kesehatan dasar dan penunjang Kesehatan.
- 9) Terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- 10) Terpenuhinya sumber dana (Anggaran) Kesehatan dari berbagai sumber untuk penyusunan program.
- 11) Meningkatnya PHBS pada Masyarakat.
- 12) Meningkatnya upaya Kesehatan berbasis Masyarakat.

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan keselarasan serta keterkaitan yang sangat erat antar dokumen perencanaan, maka harus disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan memuat Program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran untuk setiap tahunnya.

Program adalah sejumlah Kegiatan yang telah ditetapkan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan, sekaligus dengan perencanaan jumlah anggaran yang dibutuhkan.

1. Penetapan Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan perpaduan antara pejabat pengambil



keputusan (Stakeholder). Oleh karena itu kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran di bidang Kesehatan.

2. Program.

Program adalah kumpulan kegiatan yang disistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu instansi yang merupakan penjabaran dari suatu kegiatan. Program organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie meliputi” Pelayanan peningkatan sasaran dan prasarana Kesehatan Masyarakat, Adapun rincian program Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- d. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- f. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- k. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- m. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- n. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan operasional yang nyata dan konkrit untuk dilaksanakan, hal ini tentu saja kegiatan yang bermuara pada kebijakan yang salah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan operasional yang nyata dan konkrit untuk dilaksanakan, hal ini tentu saja kegiatan yang bermuara pada kebijakan yang telah ditetapkan.



Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan meliputi :

- a. Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- d. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi , gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tabel II.1 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Kabupaten	26 Pusk, 71 Pustu, 112 Poskesdes
	Jumlah puskesmas terakreditasi	0
	Rasio Dokter	45
Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka kelangsungan hidup bayi/ 1000KH	987
	Angka kematian ibu / 100.000 KH	135
	Prevalensi kurang gizi pada balita	12
	Presentase Balita stunting	11.64
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pidie	Presentase balita gizi kurang	0.96
	Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)	15
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
	Cakupan penemuan penderita diare	70
	Cakupan kunjungan ibu hamil	74
	Cakupan pelayanan ibu nifas	91



	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	92
	Cakupan kunjungan bayi	91
	Cakupan kunjungan balita	67
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	15
	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD atau setingkat	81



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dimaksud untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesien dengan cara membandingkan antara *output* dan *input* baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesien yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Kemudian dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam mewujudkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan/ditentukan beberapa program dengan beberapa kegiatan operasionalnya melalui penerapan indikator kinerja. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie adalah suatu proses penilaian secara reguler atas total output yang dihasilkan untuk menelusuri kemajuan program kearah pencapaian tujuan berdasarkan sasaran strategis atau merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran dimaksud perlu dilakukan karena merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*) akan memberikan informasi singkat dan akurat tentang keberhasilan dan kegagalan dalam



pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, kebijakan, sasaran, arah dan tujuan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja, berkaitan dengan hal tersebut terdapat empat tahapan penetapan, yaitu :

1. Penyiapan dokumen Rencana Strategis.
2. Penyiapan dokumen Rencana Kerja Tahunan.
3. Penetapan Kinerja atas Rencana Kerja Tahunan yang sudah dibakukan.
4. Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka maksimum capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%
- b. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target Indikator Kinerja Utama adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- c. Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori seperti tertera dalam table berikut :

Tabel III.1. Kategori Pencapaian Kinerja.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan dokumen Penetapan kinerja (PK), realisasi pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai berikut :



Tabel III. 2
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Pidie Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA		TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	PRESENTASE REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	1. Presentase ketersediaan obat dan vaksin diKabupaten	93%	93%	100%	96%	96%	
		2. Jumlah puskesmas terakreditasi	0	0	26	26	100%	
		3. Rasio Dokter	45,2	45,2	45	28	62%	
II	Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Angka kelangsungan hidup bayi/ 1000KH	983	970	980	985	100%	
		2. Angka kematian ibu/ 100,000K	179	146	140	233	60%	
III	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pidie	1. Presentasi balita gizi kurang	5,27	1	<5%	5 %	100%	
		2. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)	4,17	79	90	62	68%	
		3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100 %	
		4. Cakupan penemuan penderita diare	33	41	66	46	69%	
		5. Cakupankunjungan ibu hamil (K4)	68	66	71	61	85%	
		6. Cakupan pelayanan ibu nifas	83	76	86	73	84%	
		7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	85	81	89	76	85%	
		8. Cakupan kunjungan bayi	88	85	88	85	96%	
		9. Cakupan kunjungan balita	65	61	64	90	140%	
		10. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	3,2	1,9	10	0,5	5%	
		11. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100%	
		12. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD atau setingkat	58	75	78	93	119%	



1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 di bawah ini :

Tabel III. 3
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PRESENTASE CAPAIAN	KATAGORI
1	2	3	4	5	6
1	Presentase ketersediaan obat dan vaksin diKabupaten	100%	96%	96%	Sangat Baik
2	Jumlah puskesmas terakreditasi	26	26	100%	Sangat Baik
3	Rasio Dokter	45	28	62%	Cukup
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS				86%	Sangat baik

Hasil pengukuran sasaran strategis I pada Tabel III. 3 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sangat baik.

1. Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Kabupaten

Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam program Obat dan Perbekalan Kesehatan ada dua kegiatan yaitu 1) Peningkatan pelayanan, pemenuhan, pembinaan, pengawasan di Bidang Kefarmasian, Pangan, NAPZA, PKRT. 2) Pengelolaan Obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP). Untuk capain kinerja tahun 2023 lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 3.1
Ketersediaan Obat dan Vaksin di Kabupaten

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Presentase ketersediaan obat dan vaksin diKabupaten	93%	93%	100%	96%



2. Jumlah puskesmas Terakreditasi

Pada tahun 2023 semua puskesmas yang ada di kabupaten pidie semua sudah terakreditasi.

Tabel III. 3.2
Puskesmas Terakreditasi

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	0	26	26

3. Rasio Dokter

Rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan rencana strategis tahun 2023-2026 target rasio dokter 0,50 atau 413 dokter. Jumlah dokter di Kabupaten Pidie masih belum mencukupi dari kebutuhan target rencana strategis pada tahun 2023 yaitu dari 45 atau 180 dokter. Lebih lengkap dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel III. 3.3
Rasio Dokter

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Dokter	45,2	45,2	45	28

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan

Dalam mengukur mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel III.4 berikut ini :



Tabel III.4
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Derajat Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PRESENTASE CAPAIAN	KATAGORI
1	2	3	4	5	6
1	Angka kelangsungan hidup bayi / 1000KH	980	985	100%	Sangat Baik
2	Angka kematian ibu/ 100.000KH	140	233	60%	Kurang
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS				80%	Baik

Dari hasil pengukuran sasaran strategis II pada Tabel III. 4 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Baik.

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/ 1.000KH

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran, kematian bayi di Kabupaten Pidie tahun 2023 yaitu 15 orang per 1000 kelahiran atau 985 jiwa hidup, capaian kinerja hanya sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu 100% dari target Renstra tahun 2023.

Tabel III.4.1
Angka Kelangsungan Hidup Bayi/ 1.000KH

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi/ 1.000KH	983	970	980	985

2. Angka kematian ibu/ 100.000KH

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pidie pada tahun 2023 sebesar 15 orang.



Tabel III.4.2
Angka kematian ibu/ 100.000KH

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Angka kematian ibu/ 100.000 KH	179	146	140	233

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pidie”

Dalam mengukur mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel III. 4 berikut ini :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PRESENTASE CAPAIAN	KATAGORI
1	2	3	4	5	6
1	Presentasi balita gizi kurang	<5%	5	100%	Sangat Baik
2	Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)	90	62	68%	Cukup
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100 %	Sangat Baik
4	Cakupan penemuan penderita diare	66	46	69%	Cukup
5	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	71	61	85%	Cukup
6	Cakupan pelayanan ibu nifas	86	73	84 %	Baik
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	89	76	85%	Baik
8	Cakupan kunjungan bayi	88	85	96%	Sangat Baik
9	Cakupan kunjungan balita	64	90	140%	Sangat baik
10	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	10	0.5	5%	Kurang
11	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100%	Sangat Baik
12	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD atau setingkat	78	93	119%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS				86%	Baik



1. Presentasi Balita Gizi Kurang

Nutrisi yang baik sangat penting untuk mencegah balita dari kekurangan gizi dan memastikan perkembangan buah hati, terutama pada usia awal. Nutrisi ini bisa didapatkan bahkan sejak bayi dalam kandungan. Fase utama kebutuhan gizi balita adalah sejak masa kandungan hingga berumur dua tahun. Saat itu, organ-organ yang penting, termasuk otak, membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk bisa berkembang sepenuhnya. Ketika nutrisi tidak tercukupi, terjadi risiko balita gizi kurang bahkan menjadi gizi buruk. Untuk melancarkan pertumbuhan anak, diperlukan asupan nutrisi yang cukup seperti vitamin, kalsium, zat besi, lemak, protein, dan karbohidrat.

Tabel III. 4.1
Presentasi balita gizi kurang

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Presentasi balita gizi kurang	5.27	1	<5%	5 %

2. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)

Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung dan masih merupakan masalah utama di Pidie. Penyakit TB Paru sangat berbahaya karena bias menyebabkan seseorang meninggal dan sangat mudah ditularkan dengan Basil Tahan Asam yang dapat menular 10-15 orang disekitarnya

Tabel III. 4.2
Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISAS I	REALISAS I	TARGE T	REALISAS I
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TB BTA (+)	4,17	79	90	62



3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

Penyakit demam berdarah merupakan penyakit akut disebabkan oleh infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus betina yang umumnya menyerang pada musim penghujan.

Tabel III. 4.3
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	100

4. Cakupan Penemuan Penderita Diare

Diare adalah merupakan salah satu factor penyebab kematian bayi dan balita dan merupakan penyakit yang berpotensi menjadi KLB. Faktor perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi lingkungan yang kurang menjadi penyebab tingginya angka kesakitan diare di Kabupaten Pidie.

Tabel III. 4.4
Cakupan penemuan penderita diare

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan penemuan penderita diare	33	41	66	46

5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah Presentase kontak antara ibu hamil yang ke empat (K4) atau lebih dengan petugas kesehatan pada trimester III, dimana usia kehamilan diatas 24 minggu.



Tabel III. 4.5
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	68	66	71	61

6. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan dan dokter dilakukan minimal 3 kali. Pertama 6 jam -3 hari setelah melahirkan, lalu 4-28 hari setelah melahirkan, dan terakhir 29-42 setelah melahirkan. Menurut anjuran WHO, sebaiknya ibu nifas perlu melakukan kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali, yaitu 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang), 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah persalinan. Mobilisasi miring kiri dan kanan dapat dilakukan 8 jam setelah persalinan tergantung adanya komplikasi persalinan dan kesembuhan luka, selanjutnya pasien diminta berlatih untuk duduk dan berjalan. Makanan yang diberikan hams tinggi kalori, cukup protein, mineral dan vitamin. Tambahkan kalori 500 kalori/hari pada kebutuhan kalori total harian. Minum minimal 3 liter/hari bila tidak ada pembatasan cairan seperti pada kondisi preeklamsia.

Tabel III. 4.6
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	83	76	86	73



7. Cakupan Pertolongan Peralinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan (bidan, dokter, dan tenaga para medis lainnya). Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan?

- Tenaga Kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinanan, sehingga keselamatan Ibu dan bayi lebih terjamin.
- Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit
- Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya.

Apa Tanda-Tanda Bahaya Persalinan ?

- Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas.
- Keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan.
- Tali pusat atau tangan/kaki bayi terlihat pada jalan lahir.
- Tidak kuat mengejan.
- Mengalami kejang-kejang.
- Air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas.
- Air ketuban keruh dan berbau.
- Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar.
- Gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat.
- Keluar darah banyak setelah bayi lahir.
- Bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke bidan/dokter.

Tabel III. 4.7
Cakupan Pertolongan Peralinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Pertolongan Peralinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85	81	89	76



8. Cakupan Kunjungan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi:

1. Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari-2 bulan
2. Kunjungan bayi satu kali pada umue 3-5 bulan
3. Kunjungan bayi satu kali pada umur 6-8
4. Kunjungan bayi satu kali pada umur 9-11 bulan

Tabel III. 4.8
Cakupan Kunjungan Bayi

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Kunjungan Bayi	88	85	88	85

9. Cakupan Kunjungan Balita

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja masing-masing dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar.

Tabel III. 4.9
Cakupan Kunjungan Balita

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Kunjungan Balita	65	61	64	90



10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Capaian Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pidie tahun 2023 sangat rendah yaitu hanya 0,5 %. Salah satu penyebab tidak tercapainya imunisasi lengkap anak di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Pidie yaitu dipengaruhi tentang adanya informasi yang berkembang di masyarakat terkait tingkat kehalalan vaksin imunisasi.

Tabel III. 4.10
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	3.2	1.9	10	0.5

11. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan”

Ketika bayi lahir makanan yang paling ideal adalah ASI. Kandungan ASI mampu memberikan energi dan nutrisi untuk tumbuh kembangnya seperti protein, lemak, vitamin dan mineral, menginjak usia 6 bulan kebutuhan nutrisi si kecil bisa ditambahkan melalui makanan pendamping ASI.

Kurang gizi yang tidak ditangani sejak dini bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fisik maupun mental si kecil, ia pun menjadi lebih rentan terhadap penyakit seperti diare dan pneumonia (radang paru), serta bisa menurunkan kualitas hidup

Tabel III. 4.11
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100	100	100	100



12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat.

Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Penjaringan kesehatan dilakukan pada peserta didik kelas 1 SD sedangkan untuk kegiatan UKGS dilakukan pada anak didik kelas 1 sampai dengan 5 SD.

Capaian Penjaringan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat di Kabupaten Pidie tahun 2023 yaitu 140%, melebihi target renstra (100 persen).

Tabel III. 4.12
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TAHUN 2023	
		REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD atau Setingkat	58	75	78	93

Berdasarkan penjelasan dan pengukuran kinerja di atas, dengan menggunakan perhitungan sederhana berikut ini :

$$\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan realisasi}}{\text{Jumlah semua Kegiatan}} \times 100\%$$

Maka didapat rata-rata realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 86%. Dengan demikian berdasarkan tabel kategori pencapaian kinerja di atas maka masuk kedalam **Kategori Pencapaian Urutan II**, termasuk kedalam kategori capaian kinerja yang **Baik**.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2023

Jumlah pagu setelah perubahan, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Otonomi Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp. 155.456.897.770,-** (*Seratus lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) terdiri



dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 115.104.302.600,-** (*Seratus lima belas milyar seratus empat juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah*) dan Belanja Langsung **Rp. 40.352.595.170,-** (*Empat puluh milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah*).

Berdasarkan jumlah pagu setelah perubahan APBK (APBK-P 2023), Akuntabilitas keuangan pendukung capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie disajikan menurut Program/ Kegiatan dapat dilihat sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel III.11. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023

PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA ANGGARAN (RP)	%
1		2	3	4	5
BELANJA DAERAH					
BELANJA TIDAK LANGSUNG		115.104.302.600	106.589.979.217	2.599.786.832	92%
BELANJA LANGSUNG		40.352.595.170	37.953.270.903	2.399.324.267	94%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.899.669.287	110.265.926.501	8.633.742.786	93%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.735.876.204	30.311.529.480	1.424.346.724	96%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.288.244.910	2.176.278.856	571.966.054	83%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	327.868.100	304.662.140	23.205.960	93%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.205.239.269	1.125.659.853	79.579.406	93%



BAB IV PENUTUP

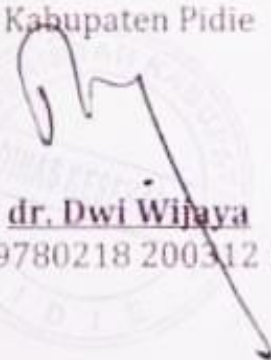
A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan hasil kegiatan program jangka pendek yang terlihat dengan jelas dari akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie bahwa persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Bab III. Ini berarti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dapat melaksanakan program, kegiatan dan kebijaksanaannya dengan baik dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasinya.

B. Saran – saran

1. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditingkatkan dana APBD untuk tahun berikutnya
2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dan peningkatan pelayanan kesehatan perlu diupayakan TC (Tunjangan Khusus) kepada para pegawai.

Sigli, 26 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pidie


dr. Dwi Wijaya
Nip. 19780218 200312 1 004